



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-281/MK.6/2021 30 Juni 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020

Yth. Para Menteri/Pimpinan Lembaga
(mohon periksa daftar terlampir)

Sehubungan dengan Surat Anggota II BPK RI Nomor 46/S/IV-XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan persediaan sebesar Rp4,59 triliun pada 39 Kementerian/Lembaga (K/L) tidak Memadai;
 - b. Pengendalian atas pengelolaan aset tetap belum memadai yang berdampak terhadap kevalidan dan keakuratan data;
 - c. Pengendalian atas pengelolaan aset tak berwujud dan aset lain-lain pada 56 K/L belum memadai.
2. Sehubungan dengan angka 1, guna menciptakan peningkatan kualitas pengelolaan BMN dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, maka K/L perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pengendalian dan Pengelolaan Persediaan
 - 1) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan stock opname dan ketertiban penatausahaan persediaan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L;
 - 2) Melakukan proses pengelolaan atas persediaan yang dari awal pengadaannya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah secara tertib;
 - 3) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan persediaan di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.
 - b. Pengendalian dan Pengelolaan Aset Tetap
 - 1) Melakukan identifikasi dan monitoring atas aset tetap bersaldo minus dan/atau aset tetap yang mengalami anomali data serta menyelesaikan/memperbaikinya melalui mekanisme yang berlaku;
 - 2) Melakukan identifikasi dan monitoring atas aset tetap yang belum memiliki bukti/sertifikat kepemilikan;
 - 3) Menyelesaikan/memproses bukti/sertifikat kepemilikan aset tetap;

4) Menyelesaikan...

- 4) Menyelesaikan penyelesaian atas proses tindak lanjut atas BMN Tidak Ditemukan dalam proses Penilaian Kembali BMN;
 - 5) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan penatausahaan aset tetap kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L;
 - 6) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan BMN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.
- c. Pengendalian dan Pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB)
- 1) Mengefektifkan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan;
 - 2) Melakukan identifikasi dan monitoring atas ATB bersaldo minus dan/atau ATB yang mengalami anomali data serta menyelesaikan/memperbaikinya melalui mekanisme yang berlaku;
 - 3) Melakukan penelusuran atas ATB yang tidak diketahui keberadaannya dan memperbaiki penyajiannya dalam Laporan Keuangan sesuai ketentuan.
 - 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan penatausahaan ATB kepada satuan kerja di lingkungan K/L;
 - 5) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan BMN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.
3. Selanjutnya, sebagai bahan untuk mengidentifikasi tindak lanjut setiap temuan dan untuk melakukan langkah-langkah sebagaimana angka 2, terlampir kami sampaikan rincian temuan pemeriksaan per masing-masing K/L.

Demikian kiranya dapat kami sampaikan, untuk mohon dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan
3. Wakil Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat Direktur Jenderal Kekayaan
Negara a.n. Menteri Keuangan

Daftar Menteri/Pimpinan Lembaga

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Pertahanan
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Menteri Keuangan
7. Menteri Pertanian
8. Menteri Perindustrian
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Menteri Perhubungan
11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
12. Menteri Kesehatan
13. Menteri Agama
14. Menteri Ketenagakerjaan
15. Menteri Sosial
16. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17. Menteri Kelautan dan Perikanan
18. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
20. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
21. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
22. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
23. Menteri Pariwisata
24. Menteri Badan Usaha Milik Negara
25. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
26. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
28. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
30. Menteri Komunikasi dan Informatika
31. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

32. Menteri Perdagangan
33. Menteri Pemuda dan Olah Raga
34. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
35. Kepala Badan Intelijen Negara
36. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
37. Kepala Badan Pusat Statistik
38. Kepala Perpustakaan Nasional
39. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
40. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
41. Kepala Lembaga Ketahanan Nasional
42. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
43. Kepala Badan Narkotika Nasional
44. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
45. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
46. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
47. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
48. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
49. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
50. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
51. Kepala Badan Informasi Geospasial
52. Kepala Badan Standardisasi Nasional
53. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
54. Kepala Lembaga Administrasi Negara
55. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
56. Kepala Badan Kepegawaian Negara
57. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
58. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
59. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
60. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
61. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
62. Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
63. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

64. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
65. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
66. Kepala Badan Pengawasan Pemilihan umum
67. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
68. Kepala Badan Keamanan Laut
69. Kepala Badan Ekonomi Kreatif
70. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
71. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
72. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
73. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
74. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
75. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia
76. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
77. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
78. Sekretaris Utama Komisi Pemilihan Umum
79. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
80. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
81. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
82. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
83. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
84. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
85. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
86. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
87. Direktur Jenderal Anggaran (BA 999.08)

LAMPIRAN

**TEMUAN PEMERIKSAAN BPK PADA LHP LKPP TAHUN 2020
PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN ASET TETAP
BELUM MEMADAI YANG BERDAMPAK TERHADAP KEVALIDAN DAN
KEAKURATAN DATA**

Lampiran 123

Daftar Koreksi Revaluasi Pada Database SIMAN
yang Tidak Ditemukan Barangnya Pada SIMAK BMN

(dalam Rupiah) Isian ini perlu Detil per NUP

No	KD Kanwil	KD KPKNL	Kode BA	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Barang	Nilai Barang	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan KL	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan KPKNL	Progress Saat Ini	Sisa Tindak Lanjut		
										NUP	Rp	NUP	Rp
1	13	13104	005	005011600477270000KD	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	9	7,817,092,000					9	7,817,092,000
2	13	13104	005	005011600682295000KD	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	1	130,446,000					1	130,446,000

Lampiran 124

Daftar Selisih Nilai Wajar Baru SIMAN dengan Nilai Aset dalam SIMAK BMN

No	Kode BA	Nama KL	Jumlah Barang	Selisih Nilai Aset	Selisih Akumulasi Penyusutan	Selisih Beban Penyusutan	(dalam Rupiah)	TOTAL	TOTAL (absolut)	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan KL	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan KPKNL	Progress Saat Ini		Sisa Tindak Lanjut		
												NUP	Rp	NUP (4-11)	Rp (9-14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3	005	Mahkamah Agung	334	719,722,324.00	(2,841,223,619.00)	3,516,540,036.00	1,395,038,741.00	7,077,485,979.00					334		7,077,485,979	

Lampiran 127 Sandingkan data BTD dari BPK dan SIMAN

Daftar Aset Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi dan Perbaikan Penilaian Kembali Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Lampiran 128

Daftar Aset Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang Tidak Digunakan
(dalam Rupiah) Detil Per NUP

No	Kode BA	Nama K/L	Jumlah Barang	Nilai Barang	Tindak Lanjut yang Akan dilakukan	Langkah-langkah yang Sudah dilakukan	Dokumentasi	Status Saat Ini	Jumlah	Tanggapan/ Penjelasan
1	005	Mahkamah Agung	12	8,560,681,000.00					0	

Lampiran 129

Daftar Aset Tetap dengan Nilai Perolehan Minus

No	Kode BA	Nama K/L	Jumlah Barang	Nilai Aset Tetap	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan	Progress Saat Ini	Sisa Tindak Lanjut
2	005	Mahkamah Agung	1182	(124,023,434,969.00)			1182 (124,023,434,969.00)

Lampiran 130

Daftar Aset Tetap dengan Nilai Buku minus

(dalam Rupiah)

No	Kode BA	Nama K/L	Jumlah Barang	Nilai Aset Tetap	Akum Aset Tetap	Saldo Aset Tetap	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan	Progress Saat Ini	Sisa Tindak Lanjut
1	005	Mahkamah Agung	853	2,032,294,583.00	(6,271,643,991.00)	(4,239,349,408.00)			853 (4,239,349,408.00)

Lampiran 131

Daftar Nilai Perolehan Aset yang Tercatat Dalam Dua Kelompok Aset

No	Kode BA	Nama K/L	Jumlah Barang	(dalam Rupiah)										Sisa Tindak Lanjut	
				Nilai Aset Tetap	Akum Aset Tetap	Saldo Aset Tetap	Nilai Aset Lain	Akum Aset Lain	Saldo Aset Lain	Saldo Temuan	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan	Progress Saat Ini	NUP	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(5+8)		NUP	Rp	NUP	Rp
1	005	Mahkamah Agung	128	7.036.860.924,00	(909.236.121,00)	6.127.624.803,00	2.232.765.739,00	(329.829.031,00)	1.902.936.708,00	9.269.626.663,00				128	9.269.626.663,00

Lampiran 132

Daftar Nilai Perolehan Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan Positif

(dalam Rupiah)

No	Kode BA	Nama K/L	Jumlah Barang	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Aset Tetap	Nilai Buku Aset Tetap	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan	Progress Saat Ini		Sisa Tindak Lanjut	
								NUP	Rp	NUP	Rp
3.005	Mahkamah Agung		28	7.027.778.461,00	4.970.286.980,00	11.998.065.441,00				28	11.998.065.441,00

Lampiran 133

Daftar Aset Tetap yang Tidak Disusutkan

(dalam Rupiah)

No	Kode BA	Nama K/L	Jumlah Barang	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Aset Tetap	Nilai Buku Aset Tetap	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan	Progress Saat Ini		Sisa Tindak Lanjut	
								NUP	Rp	NUP	Rp
3.005		Mahkamah Agung	80	6.295.963.185,00	-	6.295.963.185,00				80	6.295.963.185,00

Lampiran 136

Daftar Aset Tetap Tanah Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Belum Didukung Dokumen Kepemilikan

(dalam Rupiah)

No	Kode BA	Nama K/L	Jumlah Barang	Nilai Barang	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan	Progress Saat Ini		Sisa Tindak Lanjut	
						NUP	Rp	NUP	Rp
3	005	Mahkamah Agung	111	628.971.599.323,00				111	628.971.599.323,00

Lampiran 138

Daftar Aset Tetap Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang Berstatus Sengketa

(dalam Rupiah) Detil Per NUP

No	KD BA	NAMA BA	Jumlah NUP	Nilai Tercatat	Penjelasan Sengketa	Langkah Penyelesaian yang Telah Dilakukan	Dokumentasi		Status Sengketa Saat ini	Jumlah	
							Jenis Dok	Tanggal Dok	Sengketa/Selesai	NUP	Rp
1	005	Mahkamah Agung	2	3.178.244.000							

Lampiran 140

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang Tidak Jelas Keberlanjutannya

KD_BA	NM_BA	Tahun target penyelesaian						Grand Total	(dalam Rupiah)		
		2005 s.d. 2010	2011 s.d. 2015	2016	2017	2018	2019		Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan	Progress Saat Ini Rp	Sisa Tindak Lanjut Rp
005	MAHKAMAH AGUNG	437,898,000.00	199,100,000.00	8,946,956,445.00		561,464,000.00	1,665,047,541.00	11,810,465,986.00			11,810,465,986

Lampiran 142

Permasalahan AT signifikan lainnya

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan AT signifikan lainnya *	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan	Progress Saat Ini Rp	Sisa Tindak Lanjut Rp
			Permasalahan					
2	MAHKAMAH AGUNG	005	Pengungkapan KDP dalam CaLK belum memadai	--				-

Lampiran 5.12.23

Selisih Transfer Keluar pada Satker Pengirim dan Transfer Masuk pada Satker Penerima

KDBA_MASUK	NMBA_MASUK	KDBA_KELUAR	NMBA_KELUAR	PERKKOR	NMPERKKOR	NILAI_TK	NILAI_TM	SELISIH	Reklass Antar Akun (TK)	Reklass Antar Akun (TM)	Reklass antar KL	Selisih Akhir	Note	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan	Progress Saat Ini Rp	Sisa Tindak Lanjut Rp
005	MAHKAMAH AGUNG	005	MAHKAMAH AGUNG	133111	Gedung dan Bangunan	133,787,882,900	133,979,526,900	191,644,000				191,644,000	Jurnal BMN			191,644,000,00
005	MAHKAMAH AGUNG	005	MAHKAMAH AGUNG	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,541,002,151)	(1,550,015,154)	(9,013,003)				(9,013,003)	Jurnal BMN			-9,013,003,00

Lampiran 146

Penjelasan atas selisih TKTM

Penjelasan atas selisih 1

No BA	Kesalahan Input Kode Barang	Kesalahan Input Kode Satker	Kesalahan Input Nilai TK atau TM	Kesalahan Kode Eselon I	Koreksi Revaluasi	Lintas Tahun	Nilai Persediaan	Nilai Tanah	nilai TK atau TM tidak terinput
BA 005					7,047,970.00	(304,687,967.00)			

Penjelasan atas selisih 1

Penjelasan atas selisih 1

No BA	Sistem E-reckon	Tahapan yang Kurang Lengkap	Tidak Ada Selisih	TK Tidak Terbaca E-reckon	TM KL Lain	Transaksi TK Tidak Terbaca	Transfer Keluar Persediaan	Grand Total
BA 005								(297,639,997.00)

LAMPIRAN

**TEMUAN PEMERIKSAAN BPK PADA LHP LKPP TAHUN 2020
PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN ASET TAK BERWUJUD DAN
ASET LAIN-LAIN PADA 56 K/L BELUM MEMADAI**

Lampiran 147

Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Memiliki Nilai Perolehan Minus

Kode KL	Nama K/L	Jumlah Barang	Nilai Perolehan ATB/Aset Lain-Lain	Nilai Perolehan KDP Lain-Lain	Jumlah Nilai Perolehan ATB dan Aset Lain-lain	Akumulasi Amortiasi ATB dan Akumulasi Penyusutan Aset	Nilai Buku ATB dan Aset Lain-Lain	Nilai Buku KDP Lain-Lain	Nilai Buku KDP Lain-Lain	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan	Progress Saat Ini		Sisa Tindak Lanjut	
											NUP	Rp	NUP	Rp
005	MAHKAMAH AGUNG	4	(3,430,000.00)	-	(3,430,000.00)	2,980,000.00	(450,000.00)	-	(450,000.00)			4	(3,430,000.00)	

Lampiran 148

Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Memiliki Nilai Buku Minus

KODE KL	Nama K/L	Jumlah Barang	Nilai Perolehan ATB dan Aset Lain-Lain	Akumulasi Amortisasi ATB dan Akumulasi	Nilai Buku	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan	Progress Saat		Sisa Tindak Lanjut	
							NUP	Rp	NUP	Rp
005	MAHKAMAH AGUNG	12	4,900,000.00	(98,845,400.00)	(93,945,400.00)				12	(93,945,400.00)

Lampiran 150

Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Tidak Memiliki Nilai Akumulasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan

Kode K/L	Nama K/L	Jumlah Barang	Akumulasi Amortisasi ATB dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	Nilai Buku ATB dan Aset Lain-Lain	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan	Progress Saat Ini		Sisa Tindak Lanjut	
						NUP	Rp	NUP	Rp
005	MAHKAMAH AGUNG	14	0	248,292,008				14	248,292,008

Permasalahan Aset Tak Berwujud Signifikan Lainnya

No	Nama K/L	BA	Uraian Temuan				Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan	Progress saat Ini	Sisa Tindak Lanjut
			Permasalahan	Jenis ATB	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan			
1	MAHKAMAH AGUNG	005	BMN yang telah dilakukan penghapusan tanpa berdasarkan SK Penghapusan	Aset Lainnya					0
		005	BMN yang telah dielang belum dilakukan penghapusan	Aset Lainnya					0